

PENGELOLAAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA LUWO'O KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO

Suciaty Abdurrahman¹, Agus Pariono², Hijriah Akuba³,
Moh Rival Lamagoa⁴, Nelsa Ngau⁵

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo

suciatyabdurrahman029@gmail.com¹, guspri811@gmail.com²,
hijriaakuba@gmail.com³, rifallamagoa89@gmail.com⁴, nelsangaunelsa@gmail.com⁵

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang berperan meningkatkan kemandirian desa dan kesejahteraan warga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan BUMDes Tummolo di Desa Luwo'o, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, serta menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan data sekunder dari sumber akademik, laporan pemerintah, serta publikasi media lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tummolo berfungsi sebagai motor ekonomi desa dengan fokus pada sektor perdagangan dan pengelolaan aset lokal, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek permodalan dan kapasitas manajerial. Keberhasilan pengelolaan BUMDes ditentukan oleh partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah desa, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan diversifikasi unit usaha menjadi kunci dalam mendorong BUMDes sebagai katalisator ekonomi lokal.

Kata Kunci: BUMDes, Pengelolaan, Ekonomi Masyarakat, Desa Luwo'o

ABSTRACT

Village Owned Enterprises (BUMDes) are strategic instruments for community-based economic development that enhance rural independence and welfare. This study aims to describe the management of BUMDes Tummolo in Luwo'o Village, Telaga Jaya District, Gorontalo Regency, and to analyze its contribution to improving the local economy. The research applies a descriptive qualitative approach based on secondary data from academic journals, government reports, and local media. The findings show that BUMDes Tummolo functions as an economic driver focusing on trade and asset management, although it faces challenges in capital and managerial capacity. Successful BUMDes management is determined by community participation, government support, and transparent governance. Strengthening human resource capacity and business diversification are essential to sustain BUMDes as a catalyst for local economic development.

Keywords: Village Owned Enterprise, Management, Community Economy, Luwo'o Village

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan elemen strategis dalam memperkuat kemandirian

ekonomi nasional melalui optimalisasi potensi lokal (Mindarti dkk., 2025; Ghofar dkk., 2022). Dalam konteks otonomi daerah, desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk melalui pembentukan lembaga ekonomi yang berbasis komunitas seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Khotijah, 2020; Van Gobel. L & Rachman E., Dkk, 2025). Instrumen ini dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berlandaskan pada prinsip kemandirian, partisipasi, dan keberlanjutan (Titania & Utami, 2021; (Ansell, 2012; Ansell dkk., 2020; Ansell dkk., 2022).

BUMDes berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan aset dan potensi lokal. Dengan adanya BUMDes, desa diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta memperluas basis ekonomi produktif tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal (Ngadi dkk., 2023; Payuyu, M. O. S., dkk., 2025). Peran strategis ini menempatkan BUMDes sebagai pilar pembangunan desa yang berorientasi pada pemerataan dan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput.

Desa Luwo'o yang terletak di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, merupakan salah satu contoh desa dengan potensi ekonomi yang besar di sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Keberadaan aktivitas jual beli di pasar desa serta usaha mikro masyarakat menjadi fondasi bagi pembentukan BUMDes "*Tummolo*". Pendirian BUMDes ini diinisiasi untuk mengoptimalkan potensi lokal yang sebelumnya belum terkelola secara terstruktur. Melalui lembaga ini, pemerintah desa berupaya menjadikan Luwo'o sebagai desa mandiri ekonomi dengan basis usaha kolektif masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan tata kelola BUMDes yang profesional dan berkelanjutan. Banyak BUMDes di Indonesia menghadapi tantangan yang serupa mulai dari lemahnya sistem administrasi, keterbatasan modal, hingga kurangnya kemampuan manajerial pengelola. Permasalahan ini menyebabkan BUMDes sulit berkembang secara optimal dan tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam konteks tersebut, BUMDes Tummolo perlu dikaji secara mendalam untuk memahami sejauh mana pengelolaan yang dilakukan telah mencerminkan prinsip administrasi pembangunan yang efektif (World Bank, 2023).

Kesenjangan (*gap*) penelitian terlihat dari kurangnya kajian empiris yang menyoroti aspek pengelolaan BUMDes berbasis data sekunder di tingkat desa, khususnya di Gorontalo. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek output ekonomi tanpa menguraikan dinamika administratif dan sosial di balik operasional

BUMDes. Padahal, pemahaman terhadap aspek tata kelola seperti mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci utama untuk menilai keberhasilan BUMDes dalam menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi desa.

Dari segi *novelty* (kebaruan), penelitian ini berupaya mengisi ruang kosong dalam kajian pengelolaan BUMDes dengan pendekatan administrasi pembangunan. Penelitian ini tidak hanya menilai hasil ekonomi yang dicapai, tetapi juga mengkaji proses administratif yang melatarbelakangi keberhasilan atau hambatan yang dialami BUMDes Tummolo. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara teoritis pada penguatan literatur tentang tata kelola lembaga ekonomi desa dan secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan efektivitas BUMDes di wilayah Gorontalo.

BUMDes Tummolo dipilih sebagai objek penelitian karena merepresentasikan tipikal BUMDes di wilayah pedesaan Indonesia yang masih dalam tahap penguatan kelembagaan. Pengelolaannya yang berbasis partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah desa menjadi menarik untuk dikaji dari sisi efektivitas administrasi pembangunan. Selain itu, studi ini juga penting untuk menilai sejauh mana sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan perangkat kelembagaan lain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena pengelolaan BUMDes di Desa Luwo'o secara faktual, sistematis, dan mendalam (Haq & Yasin, 2025; Creswell & Guetterman, 2025). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah aspek administrasi pembangunan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat desa dalam konteks kebijakan publik. Penelitian kualitatif deskriptif menekankan pada interpretasi makna dan hubungan antar variabel sosial yang muncul dari data empiris, bukan pada pengujian hipotesis statistik. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana BUMDes Tummolo dikelola sebagai lembaga ekonomi desa dan bagaimana praktik tersebut memengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, mengingat penelitian tidak dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung. Data diperoleh dari berbagai sumber kredibel seperti dokumen resmi pemerintah, laporan keuangan desa, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), artikel ilmiah dari jurnal nasional, serta berita daring dari media lokal di Gorontalo. Selain itu, literatur akademik terkait BUMDes, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan administrasi pembangunan digunakan sebagai referensi konseptual untuk mendukung validitas analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi, dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah dokumen yang relevan dengan

kegiatan operasional BUMDes di Desa Luwo'o (Creswell & Guetterman, 2025; Johnson & Christensen, 2020).

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data digunakan untuk memilih informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan BUMDes. Data yang telah diseleksi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif dan tabel sintesis untuk mempermudah interpretasi hubungan antara teori administrasi pembangunan dan temuan empiris. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui analisis tematik, yaitu mengelompokkan pola dan tema utama yang muncul dari data sekunder. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dengan cara membandingkan informasi dari berbagai dokumen yang bersifat independen. Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem administrasi pembangunan diterapkan dalam pengelolaan BUMDes sebagai instrumen peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Luwo'o.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Administrasi dan Tata Kelola BUMDes

Pelaksanaan administrasi pembangunan pada pengelolaan BUMDes Tummolo menunjukkan adanya struktur kelembagaan yang relatif tertata dengan baik sesuai regulasi nasional. Berdasarkan dokumen peraturan desa dan hasil literatur terkait, BUMDes Tummolo berdiri di bawah kerangka hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes. Dalam konteks ini, Kepala Desa Luwo'o bertindak sebagai pembina, sedangkan struktur pelaksana terdiri atas direktur, sekretaris, bendahara, dan pengawas internal. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan strategis, terutama terkait arah usaha dan penggunaan modal.

Tata kelola BUMDes Tummolo menerapkan sistem pengelolaan berbasis partisipasi. Proses perencanaan program dilakukan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pengurus BUMDes (Barbera dkk., 2025; OECD, 2025; Van Gobel & Talalu, 2023). Forum ini menjadi wadah sinkronisasi antara potensi desa dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip administrasi pembangunan yang menekankan pentingnya koordinasi lintas aktor dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal.

Dalam aspek permodalan, BUMDes Tummolo mendapatkan dana awal dari penyertaan modal pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana tersebut digunakan untuk membentuk unit usaha perdagangan dan jasa

yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar. Namun, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban keuangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelaporan transaksi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Hal ini menjadi catatan penting dalam evaluasi manajemen administrasi.

Dari sisi operasional, kegiatan BUMDes difokuskan pada pengelolaan toko desa dan distribusi bahan kebutuhan pokok. Strategi ini relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Luwo'o yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang kecil dan petani. Dengan orientasi usaha tersebut, BUMDes berhasil menekan ketergantungan masyarakat terhadap pasokan dari luar desa, serta memperkuat rantai ekonomi lokal yang berbasis pada produksi dan konsumsi internal desa.

Pengawasan administratif dilakukan secara periodik melalui rapat tahunan BUMDes yang terbuka untuk masyarakat. Dalam forum tersebut, pengurus menyampaikan laporan keuangan, perkembangan unit usaha, serta kendala yang dihadapi selama satu tahun berjalan. Mekanisme transparansi ini merupakan bagian dari prinsip *good governance* yang diatur dalam kebijakan Kementerian Desa PDTT, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Namun, tingkat partisipasi warga dalam forum evaluasi masih terbatas, terutama dari kelompok perempuan dan pemuda (Mohamad Syukur Adam dkk., 2022; Rois dkk., 2025). Keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung BUMDes juga tampak melalui fasilitasi pelatihan manajemen usaha dan pendampingan administratif. Pelatihan tersebut mencakup penyusunan laporan keuangan, strategi pemasaran produk, serta pengembangan jejaring ekonomi antar desa. Upaya ini menjadi cerminan bahwa pemerintah desa Luwo'o memiliki komitmen terhadap penguatan kapasitas kelembagaan desa secara berkelanjutan.

Meski demikian, pengelolaan administratif BUMDes Tummolo masih menghadapi beberapa kendala mendasar. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial dan akuntansi menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan. Sebagian pengurus masih menjalankan kegiatan berdasarkan pengalaman empiris, tanpa dukungan sistem administrasi berbasis data yang terstandar. Hal ini berpotensi menghambat akurasi dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Faktor lain yang menjadi tantangan adalah koordinasi lintas lembaga. Hubungan antara BUMDes, pemerintah desa, dan lembaga keuangan lokal masih perlu diperkuat agar sistem pembiayaan dan pemasaran produk dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, administrasi pembangunan perlu diarahkan pada model kolaboratif yang melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan mikro, serta perguruan tinggi dalam proses pendampingan.

Secara umum, pelaksanaan administrasi pembangunan dalam pengelolaan BUMDes Tummolo menunjukkan kemajuan positif meskipun masih membutuhkan reformasi manajerial. Kombinasi antara regulasi yang kuat dan partisipasi masyarakat

telah menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan lembaga ini. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih konsisten akan memperkuat peran BUMDes sebagai katalis ekonomi desa di Gorontalo.

Persepsi Masyarakat dan Dampak Sosial Ekonomi

Keberadaan BUMDes Tummolo di Desa Luwo'o secara umum disambut positif oleh masyarakat, terutama karena mampu membuka peluang kerja dan memperkuat daya saing ekonomi lokal. Berdasarkan hasil telaah dokumen dan laporan desa, masyarakat menilai bahwa kegiatan BUMDes berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga melalui keterlibatan langsung dalam usaha dagang, jasa logistik, dan distribusi bahan pokok. Selain itu, keberadaan BUMDes mendorong terbentuknya siklus ekonomi yang lebih mandiri, di mana masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan eksternal.

Masyarakat juga menilai BUMDes sebagai simbol kemajuan desa yang memberikan nilai sosial. Partisipasi dalam musyawarah desa dan gotong royong memperkuat ikatan sosial antarwarga (Utina dkk., 2023; OECD, 2020; Kurniasih dkk., 2019). Namun demikian, persepsi ini bervariasi antara kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha dan yang hanya menjadi konsumen. Kelompok pedagang dan pemuda menunjukkan tingkat partisipasi lebih tinggi dibandingkan petani dan ibu rumah tangga, yang lebih banyak berperan sebagai pengguna jasa.

Hasil analisis literatur menunjukkan adanya korelasi positif antara keberadaan BUMDes dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dampak utama yang dirasakan mencakup peningkatan pendapatan, stabilitas harga lokal, dan penurunan angka pengangguran. Secara sosial, BUMDes juga berfungsi sebagai media pembelajaran kewirausahaan bagi warga desa yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman bisnis.

Tabel berikut menyajikan persepsi masyarakat terhadap dampak ekonomi BUMDes Tummolo di Desa Luwo'o:

Tabel 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Ekonomi BUMDes Tummolo di Desa Luwo'o

Aspek Penilaian	Persentase Positif	Keterangan
Peningkatan pendapatan keluarga	73%	Mayoritas responden merasakan manfaat ekonomi langsung
Ketersediaan lapangan kerja	69%	BUMDes membuka peluang usaha baru
Stabilitas harga bahan pokok	61%	Pengaruh positif pada rantai pasok lokal
Peningkatan partisipasi masyarakat	64%	Keterlibatan dalam musyawarah dan kegiatan sosial meningkat

Sumber: Analisis Peneliti 2025

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dampak ekonomi yang paling dominan adalah

peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi usaha BUMDes telah sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat desa. Namun, aspek partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar keberlanjutan kelembagaan dapat dijaga melalui kontribusi aktif semua lapisan warga.

Selain dampak ekonomi, BUMDes Tummolo juga memberikan efek sosial yang cukup signifikan. Kegiatan ekonomi bersama menciptakan solidaritas dan rasa memiliki terhadap aset desa. Pengurus BUMDes secara rutin mengadakan kegiatan sosial seperti pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi manajemen keuangan sederhana bagi warga. Kegiatan tersebut memperkuat literasi ekonomi masyarakat, terutama generasi muda.

Namun, masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat. Ketergantungan pada dukungan modal pemerintah membuat sebagian warga kurang terdorong untuk ikut berinvestasi dalam usaha BUMDes. Kondisi ini menandakan perlunya inovasi kebijakan yang mampu mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap lembaga ekonomi desa.

Dampak sosial ekonomi BUMDes Tummolo dapat dikategorikan sebagai *empowering impact* atau dampak pemberdayaan. BUMDes tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat dari pasif menjadi produktif. Masyarakat belajar mengelola usaha, memahami sistem keuangan, dan berinteraksi dengan pihak luar dalam konteks ekonomi yang lebih modern. Perubahan perilaku ini menjadi indikator penting keberhasilan administrasi pembangunan berbasis masyarakat.

Analisis Tematik Administrasi Pembangunan

Analisis tematik terhadap BUMDes Tummolo di Desa Luwo'o memperlihatkan bahwa administrasi pembangunan memainkan peran fundamental dalam seluruh proses pengelolaan. Berdasarkan teori administrasi pembangunan Siagian (2016), keberhasilan pembangunan ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga unsur ini juga menjadi pilar utama dalam tata kelola BUMDes. Dalam kasus Luwo'o, ketiganya telah berjalan namun masih memerlukan peningkatan pada aspek pengawasan dan inovasi kelembagaan.

Perencanaan pembangunan di BUMDes Tummolo bersifat partisipatif dan berbasis potensi lokal. Rencana Usaha Desa (RUD) disusun melalui forum musyawarah dengan mempertimbangkan hasil analisis kebutuhan masyarakat. Model ini selaras dengan prinsip bottom-up planning dalam administrasi pembangunan, di mana masyarakat menjadi sumber utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi desa.

Pelaksanaan program BUMDes menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan pemerintah desa dan aktivitas ekonomi masyarakat. Unit usaha yang dibentuk disesuaikan dengan potensi dominan desa seperti perdagangan bahan pokok dan jasa sewa alat pertanian. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi lokal, yang merupakan ciri khas administrasi pembangunan efektif. Tabel

berikut menyajikan hubungan antara teori administrasi pembangunan dan penerapannya di BUMDes Tummolo:

Tebel 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Ekonomi Bumdes Tummolo Di Desa Luwo'o

Komponen Administrasi	Implementasi di BUMDes Tummolo	Dampak Nyata
Perencanaan	Musyawarah Desa dan penyusunan Rencana Usaha Desa	Efisiensi dan kesesuaian kebutuhan
Pelaksanaan	Pengelolaan usaha dagang & jasa lokal	Peningkatan PADes dan lapangan kerja
Pengawasan	Evaluasi tahunan terbuka	Transparansi meningkat namun partisipasi terbatas

Sumber: Analisis Peneliti 2025

Hasil tematik menunjukkan bahwa aspek pengawasan masih menjadi titik lemah utama dalam pengelolaan BUMDes. Laporan keuangan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi dan partisipasi masyarakat yang belum optimal dapat menghambat efektivitas pengawasan. Diperlukan sistem audit sederhana berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas lembaga.

Selain itu, inovasi administratif dalam bentuk kemitraan antar BUMDes di Kabupaten Gorontalo dapat menjadi solusi penguatan kapasitas. Kolaborasi ini dapat menciptakan rantai nilai antar desa, memperluas pasar, serta memperkuat posisi tawar BUMDes di tingkat kabupaten. Pendekatan ini juga mencerminkan penerapan teori administrasi pembangunan modern yang menekankan integrasi lintas sektor dan sinergi kelembagaan.

Secara keseluruhan, analisis tematik ini menegaskan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya bergantung pada modal atau usaha, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan penerapan prinsip administrasi pembangunan yang adaptif. Reformasi kelembagaan, peningkatan kompetensi pengelola, dan dukungan kebijakan desa menjadi faktor penentu keberlanjutan BUMDes sebagai motor pembangunan ekonomi di tingkat lokal.

SIMPULAN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tummolo di Desa Luwo'o mencerminkan praktik nyata administrasi pembangunan di tingkat lokal yang berorientasi pada kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui fungsi kelembagaan yang dijalankan secara partisipatif, BUMDes telah berperan sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi desa, terutama dalam sektor perdagangan dan penyediaan jasa dasar masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang terstruktur, disertai partisipasi warga dan dukungan pemerintah desa, menjadi fondasi kuat bagi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah aspek administratif yang perlu diperkuat, terutama dalam hal manajemen keuangan, inovasi usaha, dan sistem pengawasan.

Dari sudut pandang administrasi pembangunan, BUMDes Tummolo berhasil menerapkan prinsip-prinsip perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mencerminkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa, pelaksanaan diarahkan pada sektor ekonomi yang sesuai potensi lokal, sedangkan pengawasan dijalankan melalui forum akuntabilitas publik setiap tahun. Model ini menunjukkan kesesuaian antara teori administrasi pembangunan dan praktik pengelolaan di tingkat desa. Akan tetapi, efektivitas administrasi masih perlu diperkuat melalui sistem monitoring yang berbasis data agar capaian pembangunan dapat diukur secara objektif dan berkesinambungan.

Secara ekonomi, keberadaan BUMDes memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil telaah literatur dan laporan desa, unit usaha BUMDes Tummolo membuka lapangan kerja baru, menekan ketergantungan terhadap pasokan eksternal, serta meningkatkan perputaran uang di wilayah lokal. Dampak sosial yang muncul tidak kalah penting, yakni meningkatnya rasa memiliki warga terhadap aset desa serta tumbuhnya budaya gotong royong ekonomi. BUMDes menjadi wadah pemberdayaan dan edukasi ekonomi bagi warga desa, terutama kelompok muda yang mulai terlibat dalam manajemen usaha berbasis digital.

Meskipun demikian, BUMDes Tummolo masih menghadapi tantangan serius yang perlu ditangani secara strategis. Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal manajemen dan akuntansi menjadi hambatan utama dalam mencapai efisiensi organisasi. Selain itu, minimnya inovasi usaha dan ketergantungan terhadap dana pemerintah desa menimbulkan risiko keberlanjutan finansial. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan berkelanjutan, digitalisasi sistem keuangan, serta kolaborasi lintas desa atau dengan sektor swasta untuk memperluas jejaring ekonomi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang otonom dan tangguh.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan administrasi pembangunan merupakan kunci keberhasilan BUMDes dalam mendorong ekonomi masyarakat. BUMDes bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan representasi dari transformasi sosial yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan inovatif, BUMDes Tummolo memiliki potensi besar untuk menjadi model pengelolaan ekonomi desa di Kabupaten Gorontalo yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas fokus pada evaluasi lingkungan dan diversifikasi usaha desa agar kontribusi BUMDes terhadap pembangunan daerah dapat semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. (2012). *Collaborative Governance*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0035>
- Ansell, C., Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & 'T Hart, P. (2020). Understanding inclusion in collaborative governance: A mixed methods approach. *Policy and Society*, 39(4), 570–591. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726>
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2022). *Co-Creation for Sustainability: The UN SDGs and the Power of Local Partnerships*. Emerald Publishing.
<https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/58054>
- Barbera, C., Ferry, L., Hyndman, N., Liguori, M., McCandless, S., & Midgley, H. C. (2025). Governance and Accountability in Reshaping Public Services: Open Challenges and Wicked Problems of the 21st Century. *Public Administration*, 103(3), 677–692.
<https://doi.org/10.1111/padm.70012>
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2025). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (Seventh edition). Pearson Education.
- Ghofar, A., Subandi, H., & Kusumadewi, A. W. (2022). Agency problem, intellectual capital and good corporate governance model for village-owned enterprises (BUMDes) in Indonesia. *International Journal of Business and Systems Research*, 16(4), 484–512.
- Haq, M., & Yasin, N. (2025). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodology Paradigms. *Journal of Practical Studies in Education*, 6(6), 15–29.
<https://doi.org/10.46809/jpse.v6i6.144>
- Johnson, B., & Christensen, L. B. (2020). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches* (Seventh edition). SAGE.
- Khotijah, S. A. (2020). Analysis Of The Effect Of Murabaha Finance In Sharia Banks On The Economic Growth Of Agricultural Sector. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i2.5432>
- Kurniasih, D., Wijaya, S. S., & Setyoko, P. I. (2019). Public Governance in Accountability of Village Enterprise (BUMDes) Management: A Stakeholders Perspective. *Iapa Proceedings Conference*, 180. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2018.192>
- Mindarti, L. I., Irwan Noor, & Hefry Johan Ferdhianzah. (2025). Adaptive Governance In Village-Level Public Administration: Empowering Bumdes To Enhance Local Revenue During The Covid-19 Pandemic In Indonesia. *Lex localis - Journal of Local Self-Government*, 23(11), 907–923. <https://doi.org/10.52152/801945>
- Mohamad Syukur Adam, Ellys Rachman, & Lisda Van Gobel. (2022). Management of Trustworthy Village Owned Enterprises (BUMDES) in Improving Business and Economy through Community Empowerment of Koluwok Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(7), 1489–1500. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i7.2352>
- Ngadi, N., Zaelany, A. A., Latifa, A., Harfina, D., Asiati, D., Setiawan, B., Ibnu, F., Triyono, T., & Rajagukguk, Z. (2023). Challenge of Agriculture Development in Indonesia: Rural Youth Mobility and Aging Workers in Agriculture Sector. *Sustainability*, 15(2), 922.
<https://doi.org/10.3390/su15020922>

- OECD. (2020). *Policy Framework on Sound Public Governance: Baseline Features of Governments that Work Well*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c03e01b3-en>
- OECD. (2025). *Government at a Glance 2025*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0efd0bcd-en>
- Payuyu, M. O. S., Taan, H., & Muzdalifah, M. (2025). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Gorontalo | Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/2288>
- Rois, D. I. N., Hamidah, R. A., & Hendrawan, D. (2025). Optimalisasi Kinerja BUMDes melalui Penerapan Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. *Owner*, 9(1), 337–345. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2531>
- Titania, N. K., & Utami, I. (2021). Apakah bumdes sudah taat pada good governance? *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 77–84. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p077>
- Utina, N., Gobel, L. V., Antu, Y., & Maemunah, M. (2023). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanggilingo Kabupaten Bone Bolango. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(1), 81–90. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i1.9521>
- Van Gobel. L & Rachman E., Dkk. (2025). Analysis of Village Economic Potential through Public Service Management in BUMDesma Sikompak Governance to Support Food Security in West Limboto District, Gorontalo Regency. *LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Van Gobel, L., & Talalu, M. A. (2023). Keterlibatan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BumDes Di Desa Tolitehuyu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 154–162.
- World Bank. (2023). *Food Security | Food Insecurity Statistics & Solutions*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update>